
MIGRASI BURUH PADA PERKEBUNAN TEBU DI MOJOKERTO 1901-1942

WORKERS MIGRATION AT SUGAR CANE PLANTATION IN MOJOKERTO IN 1901-1942

Dwi Evi Fani, Marsudi, dan Ronal Ridho'i

Universitas Negeri Malang

Jln. Semarang No.5, Kota Malang, Indonesia

dwi.evi.1707326students.um.ac.id, marsudi.fis@um.ac.id, dan marsudi.fis@um.ac.id

Diterima tanggal 3 Agustus 2021

Disetujui tanggal 8 Juni 2022

ABSTRACT

Afdeeling Mojokerto is the second largest contributor to sugar production in Surabaya. Land expansion competition, acceleration of production results, as well as the pressure of life and a liberal economy encourage people to turn into laborers in sugar factories and plantations. The agrarian law of 1870 had an impact on the transfer of rights of state land ownership to private entrepreneurs. This shift caused the opening of new economic sectors which created a need for wage workers. This study aims to observe the migration of sugar cane plantation workers in Mojokerto region. The result of this study shows that migration, supported by an increase in health services, a conducive environment for settlement, and improvement in transportation infrastructure, substantively also present various problems coming from changes in the spatial structure due to the massive number of native laborers who came to the area. Therefore, the novelty of the study is the position of workers at the local level in the demographic problem that arises because of migration.

Keywords: *migration, plantation workers, sugar cane, and Mojokerto.*

ABSTRAK

Afdeeling Mojokerto merupakan penyumbang produksi gula terbesar kedua di Keresidenan Surabaya. Persaingan perluasan lahan, percepatan hasil produksi, maupun desakan hidup dan ekonomi liberal mendorong orang untuk berpindah menjadi buruh di perkebunan dan pabrik gula. Undang-Undang Agraria 1870 berdampak pada pengalihan status hak milik atas tanah dari negara ke pengusaha swasta. Pengalihan ini berimbas pada semakin terbukanya sektor ekonomi baru yang menciptakan kebutuhan akan buruh upahan. Kajian ini bertujuan untuk mengamati migrasi masuk buruh perkebunan tebu di wilayah Mojokerto. Hasil kajian menunjukkan bahwa migrasi yang didukung oleh adanya peningkatan layanan kesehatan, lingkungan yang kondusif bagi permukiman, serta ditopang dengan perbaikan infrastruktur transportasi, nyatanya juga menghadirkan beragam permasalahan yang berasal dari perubahan struktur keruangan akibat masifnya buruh bumiputra yang datang ke wilayah tersebut. Oleh

karenanya, kebaruan pada kajian ini terlihat pada posisi buruh di tingkat lokal dalam permasalahan demografi yang muncul sebagai dampak dari migrasi.

Kata kunci: migrasi, buruh perkebunan, tebu, dan Mojokerto.

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan mekanisme pola pembangunan ekonomi Mojokerto dapat dilihat dari migrasi buruh perkebunan. Kondisi ini mengarah pada upaya perorangan guna meningkatkan pendapatannya dengan sistem kerja upah yang ditawarkan seiring dengan pertumbuhan industri gula yang masif di awal abad ke-20. Penulisan studi tentang migrasi ini penting guna merekonstruksi proses terjadinya penetrasi kapitalisme di industri perkebunan. Hal ini perlu dilakukan mengingat migrasi akan berdampak pada proses dan dinamika perkembangan suatu kota (Colombijn et al. 2019:336-337).

Mojokerto¹ merupakan penyumbang produksi gula terbesar kedua di wilayah Keresidenan Surabaya. Sebagai daerah eksploitasi perkebunan, Mojokerto terus menunjukkan perkembangan berarti hingga memasuki

tahun 1930. Perkembangan tersebut tercermin dari beragam fasilitas yang dimiliki, misalnya poliklinik, gedung sekolah, gedung pemerintahan, fasilitas jalan yang memadai, dan sebagainya.

Krisis ekonomi pada periode berikutnya menunjukkan kondisi yang menarik untuk diperbincangkan. Pemerintah kolonial mengimbau para pengusaha perkebunan agar tidak mengembalikan para buruh ke daerah asal, pada saat banyak perusahaan perkebunan terpaksa menutup perusahaan dan mengurangi jumlah buruh sebagai dampak dari krisis ekonomi 1930-1935. Periode ini disebut dengan *rand kolonisatie* (Swasono dan Singarimbun 1986:14-15). Imbauan tersebut diikuti dengan permintaan untuk membantu para buruh agar dapat mendirikan permukiman di sekitar daerah lokasi industri gula. Di lain pihak, hal ini justru menimbulkan dampak negatif di kota. Kedatangan para buruh yang tidak dibekali dengan pendidikan dan kecakapan yang memadai, minim keterampilan, serta tidak adanya tempat tinggal permanen yang mendukung, pada gilirannya berdampak pada beragam permasalahan sosial di wilayah Mojokerto.

Sejumlah kajian mengenai buruh perkebunan tebu telah dilakukan sebelumnya. Elson (1984) dalam *Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940* memusatkan perhatian pada: perkem-

¹ Afdeeling Mojokerto pada awal abad ke-20 merupakan bagian dari wilayah Keresidenan Surabaya. Afdeeling Mojokerto membawahi 4 distrik, yaitu Mojosari, Mojokerto, Mojokasri, dan Jabung (*Kolonial Verslag*, 1892). Saat ini, Mojokerto secara administratif memiliki batas wilayah sebagai berikut: (1) utara berbatasan dengan Sungai Kediri, (2) timur berbatasan dengan Kabupaten Bangil, (3) selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri, (4) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Berbek, (5) sebelah barat daya berbatasan dengan Kabupaten Kediri, dan (6) sebelah tenggara berbatasan dengan Malang (Nasution 2006:35).

bangun awal pertumbuhan perkebunan tebu, terutama di wilayah Keresidenan Pasuruan; munculnya elite lokal; kehidupan masyarakat menjelang era sistem budidaya; pengenalan sistem gula pemerintah dan dampak yang dihasilkan, mulai dari adanya beragam paksaan, sistem uang, hingga kemakmuran; munculnya spesialisasi ekonomi, pola produksi dan konsumsi; kesenjangan sosial; dan sebagainya. Adanya transisi tenaga kerja upahan gratis juga menjadi salah satu permasalahan yang diulas. Adapun perbedaannya ialah pada kajian ini pembahasan akan lebih difokuskan pada peranan buruh migran yang datang ke Mojokerto. Kemudian, Hartono (2012) dalam *Realisasi Politik Etis di Bojonegoro pada Awal Abad XX: Kajian Sosial Ekonomi* menguraikan faktor pendorong dan penarik yang menggerakkan masyarakat Madura melakukan migrasi ke Jawa Timur sebagai basis perkebunan tebu. Di kedua kajian sebelumnya, kehidupan para migran di daerah Mojokerto yang menjadi fokus tulisan ini belum tersentuh.

Sementara itu, Mojokerto sebagai lokus tulisan ini telah dikaji secara terbatas oleh Yulianingsih (2012) dan Ridho'i (2013). Keduanya berfokus pada sejarah Kota Mojokerto dengan ulasan buruh migran dalam porsi yang kecil. Karenanya, berdasarkan tinjauan atas kajian-kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian khusus mengenai migrasi buruh perkebunan tebu dan industri gula di Mojokerto belum pernah dilakukan.

Permasalahan utama dalam kajian ini adalah tentang migrasi buruh yang

muncul seiring dengan pembangunan perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula di Afdeeling Mojokerto. Adapun tujuannya untuk memahami proses migrasi masuk sebagai buruh pada perkebunan tebu di Mojokerto. Dari sini, diharapkan kebaruan tulisan akan terlihat pada posisi buruh di tingkat lokal dalam kaitannya dengan permasalahan demografi yang muncul sebagai dampak dari migrasi.

Kajian ini menggunakan perspektif sejarah sosial. Sejarah sosial penting untuk melihat suatu permasalahan dari aspek sosial, yakni hubungan sosial, interaksi, dan jaringan hubungan sosial. Pendekatan ini juga berisi tentang kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok (Kartodirdjo 1992). Kajian ini juga mengulas mengenai demografi yang berkaitan dengan buruh migran yang bekerja pada perkebunan tebu dan industri gula di Mojokerto. Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Everett S Lee (2000), migrasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor yang berada di daerah asal, faktor ekonomi, faktor pribadi, dan faktor rintangan.

B. METODE

Artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo 2003:69). Tahapan awal meliputi pengumpulan sumber primer (arsip pemerintahan, data statistik pertumbuhan penduduk, koran, serta peta) dan sumber sekunder (buku teks, artikel dalam jurnal, skripsi maupun tesis). Sumber-sumber tersebut diperoleh dari Badan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Surabaya,

Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Laboratorium Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dan Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Selain itu, penulis mengunjungi situs *maps.library.leiden.edu* untuk mendapatkan bahan penulisan berupa peta.

Pada tahap selanjutnya, setelah mendapatkan sumber yang relevan dengan tema penulisan, penulis kemudian melakukan kerja kritik dan interpretasi. Salah satunya dilakukan terhadap sumber *memori van overgave* (laporan serah jabatan) Residen Madura, F.B. Batten. Fokus utamanya pada uraian mengenai migrasi masuk masyarakat Madura di wilayah Jawa Timur, yang terjadi bersamaan dengan industri gula yang sedang tumbuh dengan pesat.

Besarnya migrasi pada 1920-1930 berdampak pada perhitungan cacah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Data kependudukan periode kolonial ini banyak dimuat dalam arsip *Volkstelling*. Upaya pencacahan yang gencar dilakukan pada 1910 dan 1920 patut untuk dibandingkan dengan berbagai sumber yang terkait dengan pengaruh perkebunan tebu terhadap adanya mobilitas sosial berupa migran masuk dalam wilayah Mojokerto.

Terakhir, artikel ini ditulis dalam sebuah historiografi yang diakronis. Pada proses penulisan, fakta satu dihubungkan dengan fakta yang lainnya berdasarkan konsep pemikiran yang sistematis, logis, dan kronologis dengan memperhatikan pula segi kausalitas (sebab-akibat).

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Pembangunan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula di Mojokerto.

Pertumbuhan Mojokerto sebagai basis perkebunan tebu merupakan manfaat dari kondisi ekologi yang menguntungkan, baik ditinjau dari keadaan tanah yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah maupun hidrologi sehubungan dengan irigasi bagi perkebunan tebu (Swasono dan Singarimbun 1986:256).

a. Kondisi Ekologi di Mojokerto

Kondisi ekologi Mojokerto didukung oleh kawasan kompleks pegunungan Pawitra (Penanggungan), Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro, yang membentang dari wilayah Pacet, Trawas, Gondanglegi, hingga Jatirejo di bagian utara dan selatan. Kawasan ini didominasi hutan rimba (Gilarsi dan Husain 2019:68). Topografi pegunungan dengan kondisi dataran Brantas yang landai menyebabkan air hujan dengan mudah membawa material vulkanis dari lereng-lereng gunung menuju delta Sungai Brantas yang subur, mulai dari Distrik Modjokerto, Modjosari Lor, Modjoagoeng, Modjorejo, hingga Modjokasri yang merupakan basis perkebunan tebu (Kusumawardani 2017:19).

Air dari aliran Sungai Brantas memberikan manfaat bagi pertumbuhan tebu di sepanjang wilayah Sinoman dan sekitarnya. Wilayah ini merupakan penyuplai tebu bagi pabrik-pabrik gula yang ada di Pabrik Gula (PG) Sentanen Lor, wilayah Ketintang II, dan wilayah Kali Kintelan. Pengendalian irigasi dan pasokan air bersih yang bersumber dari Sungai Brantas ini diatur di Mlirip,

yang sebelumnya memang difungsikan sebagai bendungan agar daerah Keresidenan Surabaya tidak kekurangan air saat musim kemarau dan tidak terjadi banjir ketika memasuki musim penghujan (Sari 2014:23).

Pembangunan proyek pengairan dilakukan di daerah aliran Sungai Brantas. Salah satunya adalah pembangunan *syphon* (sifon)² Watudakon pada 1909-1912, yang merupakan bagian dari proyek pengairan Brantas Tengah.



Gambar 1. Irigasi Watudakon sepanjang Mojokerto-Jombang. Sumber: dokumentasi penulis.

Kemudahan irigasi didapat dari sifon selebar 14.000 bau ini (Tim 1978:xlvi). Pembangunan sifon Watudakon mengubah daerah rawa menjadi daerah persawahan yang subur dan bermanfaat bagi berjalannya sistem pergiliran tanaman 3 tahunan. Sifon

Watudakon ini mengalami rehabilitasi pada 1984-1985.

Dukungan ekologi dari aliran Sungai Brantas dan pembangunan sifon Watudakon berpengaruh pada tumbuhnya perkebunan tebu secara masif. Pada gilirannya, perkebunan tebu merangsang tumbuhnya ekonomi kantong (*enclave economic*) yang bersifat *dualistic*³, ditandai dengan sistem *plantation estate company* (kapitalistik)⁴ (Colombijn dan Cote 2015:336).

b. Menjadi Basis Perkebunan Tebu di Awal Abad Ke-20

Secara politis, pertumbuhan Mojokerto sebagai basis perkebunan tebu disebabkan adanya perubahan orientasi kebijakan politik. Kebijakan politik konservatif yang berorientasi pada industri perkebunan negara, mulai

² *Syphon* (sifon) merupakan pipa yang digunakan untuk mengalirkan air dengan ukuran dan tekanan tertentu. *Syphon* juga berfungsi sebagai alat atau media untuk memindahkan air melalui pipa dengan ukuran tertentu dari hulu (daerah yang lebih tinggi) menuju hilir (wilayah bawah) yang banyak dimanfaatkan sebagai irigasi pertanian (Sayono et al. 2019:71).

³ *Dualistic* dalam hal ini dicirikan dengan: (a) sistem ekonomi perkebunan yang ditopang oleh dominasi bahwa ekspor komoditas hasil perkebunan diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional, (b) perkebunan berskala besar yang menguasai tanah yang luas (tidak terbatas), (c) kebutuhan tenaga kerja yang besar dan melebihi suplai tenaga kerja yang ada di pasar (Colombijn et al. 2019).

⁴ Sistem kapitalistik ini diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal (*capital intensive*), penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga kerja besar, penggunaan tenaga kerja upahan (*wage labour*), struktur hubungan kerja yang rapi dengan adanya spesialisasi dalam pembagian kerja secara rinci, penggunaan teknologi modern, pembentukan sistem administrasi dan birokrasi, serta orientasi penanaman tanaman komersial (*commercial crops*) yang ditujukan untuk komoditas ekspor di pasaran dunia (Suryo dan Kartodirdjo 1991:4).

beralih ke politik liberal yang berorientasi pada penguatan perkebunan swasta sehingga tanah dan tenaga kerja menjadi komponen penting. Tabel berikut merupakan bukti empirik terjadinya perubahan yang memberi kemudahan pada akses penggunaan tanah bagi perkebunan gula di Mojokerto.

Status Pemilikan	Distrik	Bau	Desa yang disurvei
Milik individual	Modjokerto	3	Kapoeng-ging
		5 ½	Trawas
Milik komunal	Modjokerto	182	Sentanen Lor
		2/5	Mengelo
		4	Lengkong
		46	Djoelang
	Modjorejo	114	Denajar
	Modjokasri	28	Gobak
Bengkok kepala desa ⁵	Modjokerto	3 1/5	Sranten
		1 ¾	Kapoeng-ging
Bengkok pejabat desa	Modjokerto	3 ½	Djoelang

Tabel 1. Perluasan hak milik atas tanah di Mojokerto tahun 1830. Sumber: Nasution 2006:54-55.

Tabel 1 menunjukkan perbedaan tingkat perluasan hak milik atas tanah di Mojokerto pada masa sistem tanam paksa. Perbedaannya dapat diketahui dari proporsi penggunaan tanah milik individual dan tanah milik komunal.

⁵ Pada masa sistem tanam paksa 1830, kepala desa diberi wewenang untuk mendistribusikan tanah guna memfasilitasi penanaman tebu. Tanah desa ini pada gilirannya dipergunakan untuk berbagai keperluan, termasuk tanah bengkok. Kepala desa diperbolehkan menggunakan tanah bengkok tersebut sebagai kompensasi atas jasanya (Elson 1984:94).

Tanah milik komunal yang dimiliki oleh desa dikerjakan secara bergilir. Pada tanah milik komunal ini berlaku sistem bagi hasil dengan penduduk, yang diatur oleh pemerintah desa.

Tanah milik individual hanya dimiliki oleh beberapa orang yang didapatkan secara turun-temurun. Keseluruhan luas tanahnya berkisar 9,5 bau. Jumlah petani yang menguasai tanah komunal dengan sistem pembagian berkala ini masing-masing 46.860 orang, 41.008 orang, dan 21.593 orang. Adapun tanah milik individual yang didapatkan secara turun-temurun adalah 1.345 bau, 5.018 bau, dan 17.392 bau. Hal ini menunjukkan adanya perubahan atau peralihan perluasan hak milik atas tanah (Nagazumi 1986:55-62).

Tabel 2 menunjukkan luas lahan di setiap distrik. Di masa itu, tanah tegalan juga mengalami perluasan.

Distrik	Luas Areal Lahan (Bau)	
	Sawah	Tegalan ⁶
Modjokerto	8.687	415
Modjokasri	13.135	1.414
Modjosari-Lor	9.957	3.542
Modjosari-Kidoel	6.295	264
Djaboeng	10.592	1.557

Tabel 2. Luas tanah pada setiap distrik di Mojokerto tahun 1892. Sumber: Kolonial Verslag 1892:18.

Perluasan areal tanam perkebunan tebu ini merupakan dampak dari sistem

⁶ Tanah tegalan (*dry field*) merupakan sistem penanaman tanaman pangan secara tetap pada daerah lahan kering (Suryo dan Kartodirdjo 1991:15).

eksploitasi melalui alat birokrasi⁷. Pemerintah berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber daya perekonomian agraris tanah jajahan, baik tanah maupun tenaga kerja (Suryo dan Kartodirdjo 1991:10). Pemanfaatan alat birokrasi pemerintah berupa organisasi desa dan para bupati ini memainkan peran penting mengingat struktur feodal masih tumbuh dengan kuat di tengah masyarakat. Selain itu, para bupati juga diberi beberapa penawaran seperti halnya *cultuurprocenten* (imbalan).

Bumiputra	Eropa	Tionghoa
Raden Adipati Ario Kromo Djojo Adi Negoro	H.H. Wegener (Asisten Residen)	Kapitan Tan Djoe An
Ngabehi Adjo Adinoto (Patih)	J.J. Blom (Sekretaris)	
De Patih (Distrik Modjokerto)		
Kiahi Tjokroaminoto (Distrik Modjokasri)		
Mas Soemadipoero (Distrik Modjosari)		Raden Djojodinoto (Distrik Djaboeng)

Tabel 3. Struktur birokrasi Mojokerto tahun 1912. Sumber: Reegerings Almanak 1914:172.

Tabel 3 menunjukkan struktur birokrasi di Mojokerto yang memegang pengaruh kuat terhadap berjalannya kontrak sewa tanah. Kesepakatan perluasan areal tanam tidak dilakukan

dengan para petani yang mempunyai tanah, tetapi secara kolektif melalui perantaraan kepala desa. Penyewaan tanah pada wilayah Distrik Modjosari memiliki jangka waktu sewa satu setengah tahun dan tidak memerlukan panjar. Sewa tanah di Distrik Modjokerto, Modjokasri, dan Djaboeng paling lama enam tahun dan menggunakan sistem panjar tanah. Biaya yang dikeluarkan untuk sewa rata-rata dalam jangka waktu satu setengah tahun yakni f30-35 per bau. Bagi petani yang menolak menyewakan tanahnya, perkebunan menyewa tanah tersebut dengan besaran biaya f70-80 per bau untuk tahun pertama dan f35-40 pada tahun kedua. Atas jasa kepala desa sebagai penyedia tanah dan tenaga kerja diberikan komisi sebesar f2,50 per bau (Nagazumi 1986:48).

2. Migrasi Buruh Perkebunan Tebu di Mojokerto

a. Faktor Pendorong dari Daerah Asal Para Migran

Usaha perkebunan identik dengan bentuk usaha pertanian skala besar yang bersifat padat modal (*capital intensive*), bercirikan penggunaan areal pertanaman luas, organisasi tenaga kerja besar, dan penggunaan tenaga kerja upahan (Suryo dan Kartodirdjo 1991:4).

Berkaitan dengan hal tersebut, faktor pendorong dari daerah asal dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, keadaan tanah, ekologi, serta pekerjaan (mata pencaharian). Daerah pelepas migran berasal dari sekitar wilayah Jawa bagian timur dan tengah. Migran dari daerah Jawa bagian timur sebagian besar berasal dari Kediri, Madiun, Bojonegoro, Ponorogo, dan

⁷ Kemudahan memperoleh tenaga kerja murah sebagai buruh perkebunan ini didasari persetujuan antara para pemilik industri gula dengan para kepala desa. Hal ini sebagai dampak dari diperkenalkannya “kerja bebas” (Elson 1984:116).

Madura. Migran dari wilayah Jawa bagian tengah berasal dari Kedu, Tegal, Rembang, dan Magelang (Hartono 2015:2-3).

Eksodus migran dari wilayah-wilayah tersebut merupakan akibat kurangnya jaminan sosial, kekurangan gizi, dan adanya epidemi penyakit, terutama pada daerah dengan tingkat mortalitas kurang dari 70 orang/mil dan fertilitas yang mengalami penurunan menjadi 10 orang/mil (Swasono dan Singarimbun 1986:11). Salah satu kasus migrasi yang terjadi karena epidemi penyakit adalah migrasi orang Madura menuju Mojokerto pada dekade 1924, yang bersamaan dengan krisis malaise. Di saat itu, masyarakat Madura terdampak epidemi penyakit, seperti cacar yang terjadi pada kawasan Bangkalan, malaria yang berjangkit di kawasan sepanjang pantai utara Jawa, dan *disentri typhus*. Tidak hanya wilayah Madura yang terjangkiti, epidemi penyakit pun terjadi di wilayah yang membentang dari Kediri hingga Rembang dan mengakibatkan migrasi masuk ke Mojokerto. Data berikut menunjukkan sebaran penyakit, seperti tipus, cacar, kolera, dan disentri.

Wilayah	Kasus 1927	Kasus 1926
Kediri	<i>Typhus abdominalis</i>	
	42	24
Madoera	<i>Pokken smallpox</i>	
	28	425
Rembang	<i>Bacillarie dysentrie</i>	
	31	0

Tabel 4. Data epidemi penyakit daerah asal para migran tahun 1926 dan 1927.
Sumber: Statistical Abstract for the Netherlands East-Indies 1927:61.

b. Faktor Penarik Migrasi Buruh pada Perkebunan Tebu

Mojokerto menjadi daerah tujuan para migran mengingat banyaknya kemudahan yang ditawarkan, mulai dari peningkatan layanan kesehatan, lingkungan yang kondusif bagi perkembangan permukiman, hingga adanya perbaikan infrastruktur transportasi. Perbaikan infrastruktur yang paling dirasakan ialah perkembangan Modjokerto Stoomtram Maatschappij pada 1898, yakni kereta api yang dilengkapi dengan jalur trem. Lee (2000) berpendapat bahwa jarak yang jauh dan transportasi yang tidak mendukung menjadi penghalang bagi seorang migran dalam mengambil keputusan. Melalui perkembangan Modjokerto Stoomtram Maatschappij, intensitas mobilitas sosial para migran menjadi semakin masif.

Pembicaraan mengenai perkembangan suatu kawasan tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsinya. Perpindahan penduduk ke suatu kawasan tertentu menunjukkan adanya pola, motif, maupun motivasi pribadi atau kelompok dalam hal mencari penghidupan yang lebih baik (Padmo 1999:57). Penyebab lain yang menjadi pendorong tingginya mobilitas penduduk⁸ dari desa menuju kota dalam

⁸ Mengenai migrasi masuk di Mojokerto dapat dilihat dari pencacahan yang dilakukan pada tahun 1930. Kelahiran yang dicatat dalam pencacahan di kecamatan (*onderdistrict*) adalah sebagai berikut. Kelahiran laki-laki sebanyak 170.526 orang, perempuan 170.526 orang, dengan total keseluruhan 354.222 orang untuk wilayah Mojokerto. Kelahiran di luar Mojokerto, untuk laki-laki sebesar 15.883 orang, perempuan 16.128 orang, dengan total 32.011 orang. (*Volkstelling* 1930 Volume III 1930:156).

skala besar (*massive urbanization*) adalah karena kota memiliki daya tarik secara ekonomi (Subroto 2002:27).

c. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Tenaga kerja dibutuhkan untuk penggarapan lahan sampai pada industri di pabrik gula yang memproduksi. Para tenaga kerja ini disebut dengan kuli yang dikelompokkan dalam regu-regu (*ploeg*). Tiap-tiap regu diawasi oleh seorang mandor di bawah pengawasan para asisten residen (Suryo dan Kartodirdjo 1991:145-146). Saat penggarapan lahan, tiap hari dibutuhkan sebanyak 5-6 orang buruh di setiap areal (bau). Tugas para buruh ini ialah membakar sisa jerami, akar padi dan rumput-rumputan, serta melakukan pemupukan yang berlangsung hingga 2 bulan. Jam kerja buruh penggarap lahan ini mulai dari pukul 07.00 hingga 17.00 atau jika dikalkulasi mencapai 10 jam kerja setiap harinya, dengan waktu istirahat selama 1-2 jam yakni pukul 11.00-13.00 (Nagazumi 1986:55).



Gambar 2. Buruh pada bagian penggarapan lahan perkebunan tebu di dekat Pabrik Gula Ketanen Modjokerto tahun 1916.
Sumber: *kitlv.nl*.

Tugas buruh penggarap lahan ini juga meliputi penyisipan pada tempat yang lowong sebanyak 2 hingga 3 kali

dengan melakukan pemupukan tambahan, menyinggung rumput, memberi air, menimbun pangkal tanaman dengan tanah sebanyak 5 kali, sesuai dengan pertumbuhan tanaman.

Gambar 2 menunjukkan bahwa perkebunan tebu yang tumbuh di masa itu memanfaatkan buruh perempuan. Mereka banyak berperan dalam pemupukan tanaman, di samping sebagai pengemas gula di stasiun pengemasan di pabrik gula. Kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat pada permulaan bulan April, sesudah memasuki masa panen padi. Bersamaan dengan itu, terjadi pergiliran tanaman. Lahan yang semula ditanami padi kemudian ditanam tebu, di bawah perantaraan kepala desa⁹ (Nagazumi 1986:53).

Pada bagian penebangan, tenaga kerja berupa buruh harian yang diperlukan cukup besar. Pekerjaan penebangan tebu ini dilakukan oleh *sinder tebang* di bawah pengawasan residen, kontrolir dan para elite desa¹⁰ (Elson 1984:42).

⁹ Sehubungan dengan perolehan sewa tanah dan tenaga kerja ini, kepala desa mendapat imbalan sebesar f5 untuk setiap batang tebu besar yang ditanam di desa sesuai dengan pengklasifikasian pertama, f4 untuk pengklasifikasian kedua, dan f3 untuk pengklasifikasian ketiga (Elson 1984:43).

¹⁰ Tugas yang dilakukan adalah melakukan pengklasifikasian tanaman tebu berdasarkan ketinggian tanaman, ketebalan batang, jumlah tunas per tanaman dan sebagainya. Pada saat tebu sudah matang, dilakukan juga klasifikasi berdasarkan hasil panen, sebagai berikut: (1) tonase 40 pikul/bau menghasilkan pendapatan sebesar f160, (2) tonase 30 pikul/bau menghasilkan f120, dan (3) tonase 20 pikul/bau menghasilkan f80 (Elson 1984:42).

Tebu harus sesegera mungkin dipres agar kadar cairannya tidak mengalami penyusutan dengan bantuan mesin *cane cutter* (Widianto 2018:13-27). Oleh karenanya, diperlukan 18-25 orang tenaga kerja di bagian ini. Tenaga kerja dengan status buruh harian yang diperlukan untuk penggilingan diberi upah sebesar f25 (Elson 1984:23).

1880			
	Laki-Laki	Perempuan	Anak-Anak
Buruh Tetap	f0,35	f0,25	-
1880			
Buruh Harian	-	-	-
1904			
Buruh Tetap	f0,30	f0,25	f0,15
1904			
Buruh Harian	f0,20	f0,15	f0,10

Tabel 5: Upah buruh harian dan buruh tetap di Mojokerto tahun 1880 dan 1904.
Sumber: Nagazumi 1986:56.

d. Sistem Kerja Upah

Daya tarik yang dimiliki oleh perkebunan tebu dengan semakin banyaknya lahan yang dibuka didukung pula dengan adanya monetisasi yang dilakukan dengan pengenalan sistem kerja upah. Sistem kerja upah memainkan peran penting sehingga sawah-sawah yang dimiliki oleh para petani mengalami penyusutan setiap tahunnya.

Upah yang ditawarkan oleh perkebunan pada 1928 untuk buruh laki-laki dan perempuan sebesar 47 sen. Untuk tahun sebelumnya, yakni 1904, upah buruh laki-laki sebesar 30 sen,

perempuan 25 sen, dan anak-anak 15 sen (*Statistical Abstract for the Netherlands East-Indies* 1927). Perbedaan tingkat upah dipengaruhi oleh jatuhnya harga gula dan depresi ekonomi. Kondisi ini juga berdampak pada kesepakatan internasional yang ditandatangani di Belanda (Kesepakatan Chadbourne) yang berisi pembatasan gula melalui *uitvoervergunningen* (izin ekspor) (Anroij 2014:199-201). Penggunaan buruh perempuan dan anak-anak dari distrik lain juga menjadi penyebab perbedaan tingkat upah.

Permasalahan ekonomi tidak terhindarkan terutama bagi para petani yang tidak mempunyai sawah. Upah yang ditawarkan akan dimanfaatkan oleh para buruh guna melengkapi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk membayar pajak, membiayai berbagai perayaan yang digelar, dijadikan sebagai modal guna pembibitan lahan pertanian, dan sebagainya (Nagazumi 1986:49-51).

Adanya berbagai pajak yang harus dibayar pada gilirannya mengakibatkan para petani menggadaikan tanahnya. Tanah di Mojokerto disewakan dengan murah guna memperoleh uang tunai yang akan digunakan untuk membayar pajak. Kondisi semakin parah karena para petani dan pemilik sawah menjadi korban dari lintah darat, dengan keharusan membayar bunga 100-300% dari setiap pinjaman mereka. Selain itu, para petani telah membelanjakan uang panjar dari hasil sewa tanah mereka dengan pengusaha perkebunan, sebelum tanah itu digarap oleh penyewa (Nagazumi 1986:52-53).

3. Pola Migrasi dan Pembentukan Komunitas Kerja Migran

a. Pola Migrasi Masuk

Pola dan arah kedatangan migrasi masuk dalam wilayah Mojokerto sebagai dampak dari kemajuan jalur transportasi, seperti pembuatan jalan-jalan baru, peletakan rel kereta api, dan jalan raya, telah mendorong terjadinya perubahan sosial. Arus migrasi masuk ini juga sebagai dampak dari adanya proses industrialisasi dan adanya *urban sprawl* (pemekaran wilayah) yang selanjutnya menandai eksploitasi lahan secara terstruktur. Hal ini sejalan dengan perkembangan Gerbong Kertosusila, meliputi Gresik, Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Ketujuh kota/kabupaten tersebut telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan merupakan sebuah kawasan strategis. Kondisi ini merupakan dampak dari perkembangan kapitalisme. Komoditas pasar, baik buruh, tanah, maupun modal, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Ridho'i 2018:4-8).

Daerah pelepas migran dari wilayah Keresidenan Bojonegoro, Banyuwangi, Lamongan, Gresik, Madiun, Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Lumajang, hingga wilayah yang dibawah oleh Keresidenan Surabaya, telah dilalui oleh pembangunan jaringan kereta api (lihat tabel 6 dan tabel 7). Wilayah pelepas migran dari Jawa Tengah, seperti Keresidenan Pekalongan, Rembang, dan Kedu, juga telah dilalui pembangunan jalur kereta api.

Distrik	Laki-Laki	Perempuan
Tanggoel	241	271
Poeger	433	398
Woelohan	433	376
Rambipoedji	84	108
Genteng	1.142	1.031
Rogodjampi	112	134

Tabel 6. Data migrasi masyarakat Jember ke Mojokerto tahun 1930. Sumber: *Volkstelling 1930 Volume III 1930:35*.

Distrik	Laki-Laki	Perempuan
Tempeh	128	100
Loemadjang	61	48
Kandangan	19	17
Ranoelemongan	318	316
Pagak	81	131
Toeren	315	313

Tabel 7. Data migrasi masyarakat Lumajang ke Mojokerto tahun 1930.

Sumber: *Volkstelling 1930 Volume III 1930:36*.

Pola dan arah kedatangan migrasi masuk juga menggunakan jalur laut, misalnya gerak migrasi dari Madura. Migrasi tersebut didukung keterhubungan antara pelabuhan di Madura dengan pusat kota di pantai utara Jawa Timur, melalui Pelabuhan Ujung Galuh (Tanjung Perak sekarang) (Poesponegoro dan Notosusanto 2010:209). Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah migran Madura di Mojokerto tahun 1930.

Distrik	Total
Sumenep	23
Pamekasan	16
Sampang	79
Bangkalan	494

Tabel 8. Jumlah migran Madura di Mojokerto tahun 1930. Sumber: pengolahan data *Volkstelling 1930 Volume III 1930:22*.

Arus migrasi masuk Madura ini juga semakin dipermudah dengan perkembangan transportasi kereta api, yakni Madoera-Stoomtram dengan relasi jalur Kamal-Kwanjar-Kalianget-Bangkalan-Kwanjar (*Reegerings Almanak* 1914:467). Perusahaan kereta api ini menjalin hubungan dengan Surabaya menggunakan kapal Madoera dan Pandoera (Memori Serah Jabatan Residen madura F.B Batten dalam ANRI 1978).

Keberhasilan Modjokerto Stoomtram Maatchpapij (MSM) sebagai sarana angkutan barang dan orang, dengan rute Porong-Mojokerto, Japanan-Bangil, dan Pacing-Pohjejer ini, dapat diketahui dari jarak tempuh rata-rata selama beroperasi, yakni sepanjang 71.818 km. Jumlah rata-rata kilometer harian mencapai 26.031 km dan lokomotif 289.731 km (Handinoto dan Nugrahini 2015:129). Jumlah pendapatan dari tiket penumpang (tidak termasuk tiket musiman) sebesar f474.462. Pada 1903, pendapatan yang diperoleh dari angkutan penumpang termasuk bagasi sebesar f49.886, sedangkan pendapatan dari angkutan barang dan lain-lain sebesar f58.140 (Anonim 1904:31).

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan bahwa kedatangan migran memang terkait dengan perkebunan tebu di Mojokerto.

Jumlah Penduduk Bumiputra 1920	Jumlah Penduduk Bumiputra 1930
Distrik Modjokerto 102.171	Distrik Modjokerto 102.191
Distrik Modjosari 132.771	Distrik Modjosari 132.769
Distrik Djaboeng 31.183	Distrik Djaboeng 60.656
Distrik Modjokasri 46.777	Distrik Modjokasri 91.727

Tabel 9. Data kependudukan di wilayah distrik yang dibawah oleh Mojokerto tahun 1920 dan 1930. Sumber: *Volkstelling* 1930 Volume VI:157; *Volkstelling* 1930 Volume VIII:68.

Tabel jumlah penduduk pada periode 1920 hingga 1930 menunjukkan perubahan pemberlakuan sistem ekonomi liberal. Ekonomi liberal berdampak pada masuknya modal swasta, menjamurnya pabrik gula, dan penguasaan atas tanah untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan. Total keseluruhan pabrik gula yang ada di Mojokerto adalah 12 pabrik.

Distrik	Pabrik Gula
Modjokasri	Gempolkerep
	Perning
Modjokerto	Sentanen Lor
	Tangoenan
	Brangkal
Modjosari Lor	Koning Willem II
	Bangsals
	Sedati
Modjosari Kideol	Ketanen
Djaboeng	Dinojo
	Soemengko
	Pohdjejer

Tabel 10. Jumlah keseluruhan pabrik gula di Mojokerto. Sumber: *Kolonial Verslag* 1892:18.

Perluasan areal tanam dan banyaknya pabrik gula yang dibuka telah mendorong kebutuhan akan tenaga kerja yang besar. Tabel 10 juga menunjukkan bahwa sebuah industri gula bisa menyerap lebih dari 1.000 orang tenaga kerja yang bekerja di perkebunan tebu dan pabrik gula (Dewi 2020:39). Besarnya tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam pabrik gula karena banyak bidang pekerjaan yang bisa dikerjakan, antara lain di stasiun penggilingan, pemasakan, pemurnian, penguapan, *puteran*, dan pembungkusan. Selain buruh tetap dan harian, buruh musiman juga merupakan kelompok besar yang datang ke Mojokerto¹¹. Kebutuhan tenaga kerja mengalami peningkatan ketika memasuki musim panen, antara bulan Juli-Oktober (Nagazumi 1986).

Migran yang datang sebagai buruh pada perkebunan tebu dan industri gula di Mojokerto tidak hanya berasal dari migran lokal saja. Para migran Eropa menempati posisi sebagai pengawas perkebunan. Para migran Tionghoa menjalankan peran, baik di bidang ekonomi maupun bekerja sebagai teknisi alat-alat produksi dalam pabrik gula.

Daerah tujuan migrasi tersebar merata di sepanjang Distrik Mojokerto, Modjosari, Djaboeng, Ngoro, Modjogoeg, dan Modjokasri. Berdasarkan data yang diolah dari *Volkstelling* 1930

Volume III, di tahun 1930, migrasi lokal di wilayah Modjokerto sebesar 102.171 orang, Modjosari sebesar 132.771 orang, Djaboeng sebanyak 60.653 orang, Ngoro sekitar 97.633 orang, Modjogoeng sebanyak 134.346 orang, dan Modjokasri sebanyak 91.722 orang.

Migrasi buruh pada perkebunan tebu pada gilirannya berdampak pada heterogenitas etnis yang dicerminkan dengan adanya penduduk Eropa, Tionghoa, Timur Asing, dan bumiputra. Menurut data dalam *Volkstelling* 1930, pada 1920, keseluruhan jumlah penduduk lokal mencapai 387.327 jiwa dan pada 1930 sebanyak 387.343 jiwa (*Volkstelling* 1930, 1930a). Pertambahan penduduk, selanjutnya mengarah pada perebutan ruang di perkotaan sebagai akibat semakin banyaknya pekerjaan baru yang ditawarkan. Kondisi ini juga dibarengi dengan peningkatan kebutuhan akan permukiman, yang sekaligus diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan akan sarana fisik, sosial, dan ekonomi perkotaan. Pemekaran fisik kota ini pada gilirannya berdampak pada lahirnya kaum marjinal¹².

Kemunculan kaum marjinal ini sebagai akibat dari ketidakseimbangan proporsi antara kesempatan kerja dengan banyaknya tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Ketidakesesuaian antara keahlian dan keterampilan kerja juga menjadi masalah krusial. Kondisi ini lantas mengakibatkan munculnya

¹¹ Buruh musiman di Mojokerto ini biasanya dikontrak dalam satu masa giling dengan diberikan fasilitas berupa tempat tinggal (barak-barak) penampungan di dekat pabrik gula. Mereka bekerja selama 6-8 jam sehari (Dewi 2020).

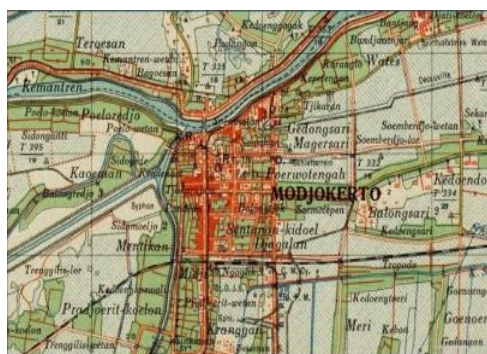
¹² Kaum marjinal yang termasuk dalam kategori ini adalah golongan petani yang tidak memiliki sawah (*lompen proletariat*) untuk dapat diusahakan secara mandiri dan pemilik tanah kecil (*landness*) (Subroto 2002).

kaum marginal, yakni masyarakat miskin yang menghuni permukiman kumuh di perkotaan. Kaum marginal ini tidak memiliki hak atas tanah, rumah, infrastruktur dan pelayanan dasar, serta kesempatan kerja. Pemenuhan hak-hak lainnya pun menjadi terpinggirkan (Miskiyyah 2020:2).

Pembahasan mengenai pertumbuhan wilayah Mojokerto perlu dilihat dari sudut kepentingan desa. Hal ini terkait dengan konsep bahwa eksistensi desa harus diposisikan sebagai partner kota yang saling membutuhkan. Proses perluasan kota ini nantinya berdampak pada perubahan struktur keruangan dan terpecahnya lahan sempit yang mengarah pada kemunculan kaum marginal di perkotaan (Subroto 2002). Perubahan struktur keruangan ini berkaitan dengan beragamnya permasalahan yang ditimbulkan, seperti menurunnya fasilitas pelayanan umum dan degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan menjadi permasalahan yang tidak bisa dihindari seiring dengan berkembangnya daerah kumuh, polusi industri, tidak efisiennya penggunaan tanah, dan minimnya akses tanah bagi pendatang baru (Tjiptoherijanto 1999:62)

Pada gilirannya, orang-orang yang bermigrasi sebagai buruh di pusat perkebunan tebu dan industri gula di perkotaan mengakibatkan kemunculan daerah pinggiran (*urban fringe*). Daerah pinggiran kemudian dapat berpotensi menjadi daerah yang rentan terhadap dampak dari perubahan yang terjadi, baik dari segi fisik keruangan maupun psikis sosial (Subroto 2002:38). Daerah pinggiran dalam kasus ini dapat dijumpai di sepanjang

wilayah Pasar Tanjung dan Pasar Kliwon yang tersebar di sepanjang Kediristraat (Jalan Mojopahit sekarang). Kawasan permukiman kumuh ini dikenal dengan nama Siponrejo yang banyak dihuni oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti tuna wisma dan tuna karya (Miskiyyah 2020:3). Area tersebut berbatasan langsung dengan daerah Jagalan yang merupakan daerah permukiman kumuh. Pada gilirannya, para gelandangan dan pengemis ini direhabilitasi dalam Kampung Tjekarajam dan Balongtjangkring (Miskiyyah 2020:5).



Peta 1. Lokasi Kampung Tjekarajam tahun 1938. Sumber: maps.library.leiden.edu.

b. Pembentukan Komunitas Kerja

Pembentukan komunitas kerja dalam usaha perkebunan dan industri gula tidak bisa dilepaskan dari cara produksi. *Pertama*, cara produksi subsisten dengan usaha berorientasi pasar, dan hubungan produksi yang mengarah pada gejala eksploitasi surplus ikatan kekerabatan. *Kedua*, cara produksi yang ditandai dengan hubungan spasial pekerja yang lebih egaliter, tetapi bersifat kompetitif. *Ketiga*, cara produksi kapitalis dengan usaha padat modal yang berorientasi pasar. Hubungan produksi dalam kaitan ini

mencakup struktur pemilik modal dan buruh (Mutmainnah, Kolopaking, dan Wahyuni 2014:5).

Organisasi produksi dalam perkebunan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu struktur atas yang ditempati oleh golongan Eropa, menengah (sebagai mandor), dan bawah yang ditempati oleh buruh. Secara struktural, perkebunan telah menciptakan terbentuknya dua lapisan sosial, yakni lapisan asing dan bumiputra. Golongan pertama banyak ditempati oleh orang Eropa yang menempati jabatan teras dengan pendapatan tinggi, seperti jabatan pimpinan. Jabatan-jabatan di level tersebut mulai dari asisten residen, staf pengelola, hingga administrator. Tenaga spesialis banyak ditempati oleh migran Timur Asing. Para migran Timur Asing yang bekerja sebagai teknisi infrastruktur ini adalah orang Arab dan Cina. Mereka juga menjalankan aktivitas dalam bidang perekonomian, misalnya sebagai pemungut cukai pasar, rumah gadai, rumah persewaan candu, dan menjadi perantara antara orang Barat dengan orang bumiputra.

Golongan kedua, yakni para mandor. Mandor ini meliputi *sinder tebang*, mandor tebang, dan mandor angkut. Para mandor ini bertugas untuk mengawasi langsung proses penebangan dan membuat jalan tebang untuk arus pengangkutan tebu menggunakan cikir (lori). Dalam melaksanakan tugasnya ini, para mandor diawasi langsung oleh residen, kontrolir, dan para elite desa (Elson 1984:42).

Golongan ketiga, yakni para penduduk bumiputra yang menempati posisi sebagai pekerja kasar atau buruh

dengan upah (*wages*) yang rendah dan fasilitas kehidupan yang terbatas selama berada di lingkungan kerja (Suryo dan Kartodirdjo 1991:35). Para tenaga kerja ini kemudian dikelompokkan ke dalam regu-regu (*ploeg*) yang diawasi oleh mandor. Adapun jenis pekerjaan yang ditawarkan meliputi kerja lapangan, berupa penggarapan tanah, pemeliharaan tanaman, dan penuaian (Suryo dan Kartodirdjo 1991:147).

Banyaknya migran masuk sebagai buruh di perkebunan tebu dan industri gula di Mojokerto pada akhirnya berdampak pada kepadatan penduduk pada awal abad ke-20.

Jumlah Penduduk	Tahun 1920	Tahun 1930
Eropa	2.342	3.005
Tionghoa	7.638	10.381
Timur Asing	459	972
Bumiputra	823.017	890.776
Total	833.456	905.134

Tabel 11. Data kependudukan Mojokerto tahun 1920 dan 1930. Sumber: *Volkstelling* 1930 volume VIII:32.

Pertumbuhan laju demografi di wilayah Mojokerto dalam tabel di atas menunjukkan persentase penduduk asing yang mencapai 10%. Hal ini berdampak pada perubahan status Mojokerto menjadi *gemeente*¹³ pada

¹³ Perubahan status menjadi *gemeente* ini didasari Undang-Undang Desentralisasi (Desentralisasi Wet) tahun 1903. Undang-undang ini menandai pengesahan pemerintahan Kota Mojokerto (*Gemeente Modjokerto*) yang otonom. Undang-undang ini juga menandai terbentuknya daerah dengan keuangan dan aparaturnya sendiri meliputi *stadgemeente* (provinsi),

1918. Selain karena terbitnya Undang-Undang Desentralisasi di tahun 1903, perubahan status Mojokerto sebagai *gemeente* juga sebagai upaya mengurangi kewenangan sentral yang sebelumnya berpusat pada Belanda. (Yulianingsih 2012:2).

D. SIMPULAN

Pertumbuhan perkebunan dan industri gula yang masif menyebabkan ledakan penduduk di Mojokerto. Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada perebutan ruang di perkotaan karena proporsi tanah dengan jumlah penduduk tidak berbanding lurus.

Perubahan demografis dengan tingkat migrasi masuk sebagai buruh perkebunan tebu pada awal abad ke-20 telah berdampak pada perkembangan fisik kota yang ditandai dengan peningkatan kebutuhan akan permukiman, sekaligus bagi kepentingan pemenuhan sarana fisik, sosial, dan ekonomi di perkotaan.

Pemekaran fisik kota sebagai bagian dari peningkatan sosial dan ekonomi Mojokerto berimbas pada lahirnya kaum marjinal yang tidak

memiliki akses terhadap fasilitas sosial dan ekonomi yang layak, terutama golongan petani yang tidak memiliki sawah (*lompen proletariat*) untuk diusahakan secara mandiri. Degradasi lingkungan juga menjadi permasalahan yang tidak bisa dihindari dengan berkembangnya daerah kumuh, polusi industri, tidak efisiennya penggunaan tanah, dan minimnya akses tanah bagi pendatang baru.

DAFTAR SUMBER

- Anonim. 1904. "Financieele Berichten." *Het Vaderland 31 Oktober 1904*, No. 258. Avondblad A.
- Anroij, Francien. 2014. *De Koloniale Staat: Negara Kolonial 1854-1942*. Leiden: National Archief.
- Batten, F. 1923. *Memori Residen Madura*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Colombijn, Freek, Martine Barwegen, Purnawan Basundoro, dan Johny Khusairy. 2019. *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Colombijn, Freek, dan Joost Cote. 2015. *Cars, Conduits, and Kampongs: The Modernization of the Indonesian City, 1920-1960*. Leiden: Brill.
- Dewi, Pratika Rizki. 2020. "Perempuan-Perempuan di Industri Gula Surakarta Abad XIX-XX." *Lembaran Sejarah* 16(1):37-47.
- Elson, Robert Edward. 1984. *Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change*
-
- afdeeling* (kabupaten) dan *gemeente* (ibu kota keresidenan) (Sari 2014:3-4). Perubahan status menjadi *gemeente* atau daerah *urban area* ini juga didasari 3 syarat utama yang dimiliki oleh Mojokerto. *Pertama*, kepadatan penduduk mencapai 500 orang lebih per kilometer persegi. *Kedua*, jumlah keluarga yang bekerja dalam sektor pertanian mencapai 25% atau kurang. *Ketiga*, telah memiliki 8 atau lebih fasilitas perkotaan. Syarat ketiga ini berkaitan dengan kelengkapan akan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan perkotaan (Mutmainnah et al. 2014:54).

- in an East Java Residency, 1830-1940*. Singapore: Oxford University.
- Gilarsi, Eriyono, dan Sarkawi Husain. 2019. "Menjinakkan Si Jago Merah: Kebakaran Hutan dan Strategi Penanganannya di Mojokerto, Jawa Timur (1890-1939)." *Jurnal Masyarakat Sejarawan* 2(2):66-82.
- Handinoto, Kartika Nugrahini. 2015. *Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII sampai Pertengahan Abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Hartono, Mudji. 2014. "Realisasi Politik Etis di Bojonegoro pada Awal Abad XX: Kajian Sosial Ekonomi." *ISTORA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 10(1).
- Hartono, Mudji. 2010. "Migrasi Orang-Orang Madura di Ujung Timur Jawa Timur: Suatu Kajian Sosial Ekonomi." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 8(1).
- Hillen, W. P. 1978. *Memori Residen Surabaya (W.P. Hillen) pada 4 Juli 1924 dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kolonial, Verslag. 1892. *Suikercultuur Op Java. Bijlagen van Het Verslag Der Handelingen van de Tweede Kamer Der Staten Generaal 1900-1901, Bijlage C*.
- Kolonial Verslag. 1892. *Suikercultuur Op Java. Bijlagen van Het Verslag Der Handelingen van de Tweede Kamer Der Staten Generaal 1900-1901, Bijlage C*.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusumawardani, Prita Ayu. 2017. *Kereta Api di Surabaya 1910-1930*. Yogyakarta: Gapura Publishing.
- Lee, Everett S. 2000. *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Kependudukan UGM.
- Margana, Sri, dan M. Nursam. 2010. *Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Miskiyyah, Latifatul. 2020. "Memukimkan Masyarakat yang Terpinggirkan di Kota Mojokerto Tahun 1970-1987: Kampung Rehabilitasi Cakarayam II dan Balongcangkring II." Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Mutmainnah, Nurul, Lala Kolopaking, dan Ekawati Wahyuni. 2014. "Urbanisasi di Kota Balikpapan: Formasi Sosial Keluarga Pendatang Miskin." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18(1):51-65.
- Nagazumi, Akira. 1986. *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial Ekonomi Abad*

- XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution. 2006. *Ekonomi Surabaya pada Masa Kolonial (1830-1930)*. Surabaya: Penerbit Intelektual.
- Padmo, Soegijanto. 1999. "Perpindahan Penduduk dan Ekonomi Rakyat Jawa, 1900-1980." *Humaniora* 11(3):56-66.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nuroho Notosusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Reegerings Almanak. 1914. *Reegerings-Almanak Voor Nederlandsch-Indie (Tweede Gedeelte)*. Batavia.
- Ridho'i, Ronal. 2018. "Antara Pemerataan dan Eksploitasi Lahan: Sidoarjo Dalam Swp Gerbang-kertosusila, 1996-2011." *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 2(1):1-16.
- _____. 2013. "Mojosari 1982-2012: Perkembangan Ekologi sebuah Kota Kecamatan di Kabupaten Mojokerto." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.
- Sari, Rahmawati. 2014. "Kota Mojokerto pada Masa Pemerintahan Walikota Samioedin 1979-1989." Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sayono, Joko, Lutfiah Ayundasari, Wahyu Djoko Sulisty, dan Ronal Ridho'i. 2019. "Utilization of Syphon Metro Kepanjen as Outdoor Learning Site for History Students." *Advance in Social Science, Education and Humanities Research* 320:69-73.
- Statistical Abstract for the Netherlands East-Indies. 1927. *Statistical Abstract for the Netherlands East-Indies*. Batavia Centrum: Voorloopige Uitkomsten te Gedeelte Java en Madoera. Departemen van Landbouw, Nijverheid en Handel.
- Subroto, Yoyok Wahyu. 2002. "Perluasan Kota dalam Realitas Sosial dan Kultural Masyarakat." *Populasi* 13(1):37-48.
- Suryo, Djoko, dan Sartono Kartodirdjo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Medika.
- Swasono, Sri Edi, dan Masri Singarimbun. 1986. *Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*. Jakarta: UI Press.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. "Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia." *Populasi* 10(2):57-72.
- Volkstelling 1930. *Volkstelling 1930 Part I, Preliminary Result of the Census of 1930 in the Netherlands East-Indies*. Batavia Centrum: Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel Landsdrukkerij-1931.
- Volkstelling 1930 Volume III. 1930. *Inheemsche Bevolking van Oost-Java: Cencus of 1930 in Native*

Population in East Java. Batavia
Centrum: Departemen van Econ-
omische Zaken.

Volkstelling 1930 Volume VI. 1930.
Census of 1930 in Netherlands
India: Europeanen in Nederland-
sch-Indie, disunting oleh N. E. H.
Departement van Landbouw.
Batavia Centrum.

Volkstelling 1930 Volume VIII. 1930.
*Overzicht Voor Nederlandsch-
Indie: Summary of the Volumes
I-VII*. Batavia Centrum: Depar-
tement van Economische Zaken.

Widianto. 2018. "Otomatisasi pada
Stasiun Gilingan di Pabrik
Gula Gempolkerep PTPN X
Mojokerto." Laporan Kerja
Praktik, Program Studi S1 Sistem
Komputer, Fakultas Teknologi dan
Informatika, STIKOM, Surabaya.

Yulianingsih, Wiwik. 2012. "Sejarah
Kota Mojokerto (1918-1942)."
Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Malang.

